

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BP2RD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

*ANALYSIS OF APPLICATION OF TAX ACCOUNTING AND REGIONAL RETRIBUTION IN TAX MANAGEMENT AND REGIONAL RETRIBUTION AGENCY (BP2RD) TALAUD ISLAND DISTRICT*

Oleh:  
**Lady Diana Latjandu<sup>1</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:  
[ladydianalatjandu@unsrat.co.id](mailto:ladydianalatjandu@unsrat.co.id)

**Abstrak:** Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah tersebut diberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan pertanggungjawaban pada masyarakat. Maka daerah dituntut untuk melakukan pencatatan akuntansi penerimaan pajak daerah dan retribusi sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam melayani publik. Sumber-sumber penerimaan daerah diantaranya adalah pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan di kabupaten kepulauan Talaud dalam hal ini pengelolaan prosedur akuntansi khususnya pendapatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Penelitian ini mengacu pada riset penelitian unsrat pada bidang unggul sosial, humaniora dan budaya dengan poin pengelolaan prosedur akuntansi khususnya pendapatan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dengan tujuan penelitian ini mengetahui apakah sudah sesuai dengan pengelolaan prosedur akuntansi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan lokasi penelitian pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud. Hasil penelitian bahwa badan pengelola pajak dan retribusi daerah sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** laporan keuangan, pajak daerah, retribusi daerah

**Abstract:** Regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions, to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. With the existence of regional autonomy given the freedom for the region to manage resources and accountability to the community. Then the region is required to record accounting for local tax revenue and levies in accordance with applicable accounting procedures, in order to increase accountability in serving the public. Sources of regional income include taxes and levies contributing to the increase in revenue in the Talaud Islands district in this case the management of accounting procedures in particular revenue so as to produce an accountable financial report. This study refers to the research of elements in the field of social excellence, humanities and culture with the point of managing accounting procedures especially revenue to produce an accountable financial report with the aim of this research to find out whether it is in accordance with the management of applicable accounting procedures. The method used is a qualitative method. With the location of the study in the regional tax and levies management agency Talaud island district. The results of the study show that the regional tax and retribution management body has followed the Minister of Domestic Affairs Regulation No. 64 of 2013 concerning the application of accrual-based government accounting standards to local governments.

**Keywords:** financial statements, local taxes, local user fees

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah tersebut diberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan pertanggungjawaban pada masyarakat. Terlebih dalam hal pendapatan, yang merupakan sumber pembiayaan supaya daerah tidak bergantung pada pusat dalam hal dana (subsidi), dalam hal ini pendapatan daerah antara lain pajak daerah, dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan pencatatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia no 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Maka laporan keuangan pemerintah baik dari daerah sampai pusat harus mengikuti standar tersebut sehingga membuat pencatatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Prosedur dari akuntansi pendapatan daerah adalah mulai dari satuan kerja atau penyeter setelah melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara dan mendapat bukti setoran yaitu Surat Tanda Setoran (STS) menyampaikan Surat Tanda Setoran (STS) tersebut ke Unit Pembendaharaan. Unit pembendaharaan selanjutnya mengesahkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan memberi tanda ke STS tersebut. Unit Pembendaharaan selanjutnya merekam Surat Tanda Setoran (STS) tersebut ke dalam tabel Surat Tanda Setoran (STS) dalam database, selanjutnya dibuat rekap Surat Tanda Setoran (STS). Satu tembusan Surat Tanda Setoran (STS) diserahkan ke Unit Pembukuan dan satu tembusan disimpan sebagai arsip. Unit pembukuan mengarsipkan Surat Tanda Setoran (STS) yang diterima dari Unit pembendaharaan. Secara bulanan Unit Pembukuan melakukan posting data Surat Tanda Setoran (STS) divalidasi. Proses posting ini dilakukan secara computer dan tidak memerlukan perekaman ulang data Surat Tanda Setoran (STS). Dengan proses posting ini maka data Surat Tanda Setoran (STS) yang terdapat dalam tabel Surat Tanda Setoran (STS) divalidasi akan dicopy ke dalam tabel buku besar sesuai tabel posting rule yang tersedia dalam database. Setelah dilakukan posting, selanjutnya Daftar Transaksi dan posting (DTP).

Selanjutnya Daftar Transaksi dan posting (DTP) diteliti kebenarannya dan dibandingkan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel

Laporan keuangan berbasis akrual meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut diperlukan perubahan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual, serta penyiapan migrasi saldo-saldo akun neraca untuk mengawali pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan standar akuntansi ini dapat mempengaruhi capaian kualitas pertanggungjawaban APBN/APBD.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak dan retribusi daerah apakah sudah sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi

#### Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Sugijanto dalam (Halim, 2007:75), mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*commercial accounting*), akuntansi pemerintahan (*government accounting*), dan akuntansi social (*social accounting*). Lingkup akuntansi pemerintahan adalah:

- a. Akuntansi pemerintah pusat
- b. Akuntansi pemerintah daerah (pemda), terdiri atas:
  1. Akuntansi pemerintah provinsi;
  2. Akuntansi pemerintah kabupaten/kota.

## **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan keuangan daerah yang dipisahkan. APBD dan barang atau kekayaan milik daerah merupakan kekayaan daerah yang dikelola langsung, sedangkan BUMD merupakan suatu contoh keuangan yang dipisahkan (Tenda, 2014).

## **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*). *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu:

- a. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah;
- b. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu;
- c. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

## **Akuntansi Keuangan Daerah**

Harahap, (2010:4) Akuntansi adalah *tool of management*, alat kapitalis untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap di tangan kapitalis.

## **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda (Halim, 2007:84)

## **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Permendagri no 64 tahun 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD  
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode tertentu.
- b. Neraca SKPD

Sumadji, Pratama, Rosita, (2006:85) Neraca adalah:

1. Suatu daftar yang memuat aktiva dan pasiva sebuah organisasi
2. Catatan tentang perbandingan untung dan rugi, utang dan piutang, pemasukan dan pengeluaran dan sebagainya dalam sebuah perusahaan pada akhir periode perdagangan.

## **Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah rangkuman dari berbagai jenis laporan keuangan pemda yang berisikan tentang maksud dan tujuan, landasan hukum maupun tentang kebijakan ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APDB (Halim, 2007:107).



**Gambar 1. Siklus Akuntansi**

### Akuntansi Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak pusat meliputi PPh, PPN, PPn BM, bea materai, dan PBB sector perkebunan dan perhutanan. Pajak daerah terbagi menjadi dua pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

### Penelitian Terdahulu

Fauziah (2011) dengan judul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi 5854a ka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sari (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.

### Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut

- Memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu akuntansi pemerintahan, dan dapat memberi referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak dan retribusi daerah
- Memberikan manfaat wawasan bagi sumber daya dalam melakukan pencatatan akuntansi pajak dan retribusi daerah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data Dan Sumber Data

Menurut Sugiyono, 2012:141 Berdasarkan sumbernya, data dibagi atas data primer dan data sekunder.

- Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Untuk mendapatkan data primer penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Dalam mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner.
- Data sekunder; adalah data yang tidak langsung diberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari dokumen. Penulis mengambil data dengan menggunakan studi literatur yang

dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu menggunakan data yang diperoleh dari internet.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian maka jenis studi yang dipakai adalah studi deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti seperti data jurnal penerimaan pajak dan jurnal penerimaan retribusi.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dari bulan maret sampai September tahun 2019

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric.

#### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli baik berupa data primer dan data sekunder. Data penelitian ini diambil di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data peneliti memilih teknik pengumpulan data arsip dan data 5855a katas5855r di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud.

#### **Metode Analisis**

Analisis dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi 5855a katas utara dengan ibukota melonguane dikenal dengan nama lain porodisa, terletak antara 05°33'00-03°38'00 Lintang Utara dan 126°38'00-127°10'00 Bujur Timur, berbatasan langsung dengan daerah davao del sur Filipina, jarak tempuh manado ke talaud kisaran 12 jam dengan memakai jasa kapal laut dengan jarak ± 345, keadaan bahari yang luas dan terdiri dari beberapa pulau dengan penghasilan kekayaan bahari dan keindahan pulau sara bisa menambah pendapatan bagi daerah.

### **Hasil Penelitian**

#### **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana 5855a kat dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, anggaran tahun 2018 dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud dibagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2018, terdiri dari:

##### **a. Pendapatan Pajak Daerah**

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8. Pajak Bea Perolehan 5856a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

**b. Hasil Retribusi Daerah**

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan**

1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

1. Penerimaan Jasa Giro
2. Tuntutan Ganti Kerugian daerah (TGR)
3. Pendapatan Denda Pajak
4. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
5. Pendapatan Dana Kapitasi JKN

**2. Dana Perimbangan**

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  
 Bagi Hasil Pajak  
 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum  
 Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus  
 Dana Alokasi Khusus (DAK)

**Pencatatan dan pelaporan**

**Pencatatan Pendapatan**

Akuntansi Pendapatan pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi pendapatan pada satuan kerja ini meliputi akuntansi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

**Akuntansi Pendapatan asli daerah**

Berikut ini Jurnal pendapatan asli daerah yang terjadi di tahun anggaran 2018 digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Jurnal Pendapatan Asli Daerah**

Kode Perkiraan	Deskripsi Perkiraan	Jumlah Debet	Jumlah Kredit
00.00 .	Kas di kas daerah	40.000.000,00	
00.00 .	Pendapatan pajak		40.000.000,00

Keterangan : Penerimaan pendapatan pajak Pada Badan Pengelola pajak dan retribusi Kab. Kepl. Talud Tahu 2018.

**Akuntansi Pendapatan Dana Perimbangan**

Berikut ini Jurnal dana perimbangan yang terjadi di tahun anggaran 2018 digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. Jurnal Dana Perimbangan**

Kode Perkiraan	Deskripsi Perkiraan	Jumlah Debet	Jumlah Kredit
01.18 . 1.1.1.03.01	Kas di kas daerah	10.851.000,00	
	Pendapatan dana perimbangan		

Keterangan : pendapatan dana perimbangan Pada BP2RD

**Buku besar**

Setelah membuat jurnal langkah selanjutnya memposting ke buku besar dengan akun/rekening masing-masing.

Contoh buku besar yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3 Buku Besar****Kode Rek : 4.1.1 Nama Rek Buku Besar : Pendapatan Asli Daerah**

No	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	31-Jan-18	Jurnal Umum – Lainnya	37.337.000,00		37.337.000,00
2	02-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	25.755.100,00		63.092.100,00
3	07-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	13.384.000,00		76.476.100,00
4	08-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	176.237.400,00		252.713.500,00
5	13-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	74.654.020,00		327.367.520,00
6	17-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	15.130.000,00		342.497.520,00
7	21-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	36.380.000,00		378.877.520,00
8	22-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	72.032.579,00		450.910.099,00
9	24-Feb-18	Jurnal Umum – Lainnya	11.993.600,00		462.903.699,00
10	01-Mar-18	Jurnal Umum – Lainnya	140.085.898,00		602.989.597,00

Pada tabel 3 hanya diambil 10 transaksi dari 99 transaksi yang terjadi di tahun 2017 kelengkapan transaksi dapat dilihat di lampiran.

**Jurnal penyesuaian**

Langkah selanjutnya membuat jurnal penyesuaian oleh PPK-SKPD dengan maksud untuk mengoreksi kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan membuat penyesuaian untuk penyusutan aset tetap, termasuk penyusutan untuk sarana dan prasarana, kendaraan dinas maupun untuk aset tetap lainnya. Hal ini karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aset tetap tersebut, dan ini sudah di jelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Neraca saldo setelah penyesuaian**

Setelah membuat jurnal penyesuaian tahap selanjutnya membuat neraca saldo setelah penyesuaian dengan cara neraca saldo dikurangi dengan penyesuaian maka akan ada beberapa perkiraan yang akan mengalami perubahan juga akan ada rekening baru yang muncul. Neraca Saldo ini tidak dibuat secara terpisah dan dibuat dalam kertas kerja kemudian PPK-SKPD menyusun laporan keuangan.

**Laporan keuangan**

Dari Neraca Saldo setelah penyesuaian kemudian tahap selanjutnya PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran tersebut dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan yang disusun oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten Kepulauan Talaud

**Pelaporan**

Pelaporan pendapatan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud, berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018**

Pendapatan	Rp.
1.Pendapatan asli daerah	Rp. 855.858.183.409,00
a. Pendapatan pajak daerah	Rp. 34.686.917.622,00
b. Hasil retribusi daerah	Rp. 10. 420.480.300,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 12.947.322.900,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 33.289.899,00
2. Dana Perimbangan	Rp 11.285.824.523,00
a. Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	Rp 15.440.965.000,00
b. Dana alokasi umum	Rp 488.354.687.000,00
c. Dana alokasi khusus	Rp 158.834.700.000,00

## **Pembahasan**

### **Penerapan Akuntansi Pendapatan**

Pencatatan pendapatan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud, sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah baik untuk pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan di buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, serta menyusun Laporan keuangan.

### **Analisis pelaporan keuangan**

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud, membuat dan menyusun Laporan Keuangan tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- LRA menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang diperbandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
- Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana pada saat (tanggal) akhir tahun anggaran.
- Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
- Kebijakan akuntansi
- Informasi rinci tentang pos-pos dalam laporan keuangan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud sudah melakukan pencatatan akuntansi pendapatan daerah dan pelaporannya, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi: Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Laporan Keuangan. Kegiatan pencatatan ini berdasarkan dengan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh Bendahara penerimaan.
- Laporan Keuangan yang dibuat setiap akhir tahun (khususnya Tahun Anggaran 2018) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018 mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

### **Saran**

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang diusulkan peneliti antara lain:

- Pada tahun yang akan datang badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten kepulauan Talaud harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- Peningkatan sumber daya dalam pengelolaan keuangan sangat penting sehingga harus diadakan bimbingan teknis dalam peningkatan sumber daya manusia dan semua sistem di SKPD sudah memakai sistem komputer yang terhubung satu dengan yang lain dan bisa mempermudah pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah, 2014*. Indonesia: Republik Indonesia, Jakarta.
- Halim, A. 200. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. (1<sup>st</sup>ed.). Indonesia: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Tenda, M, 2014. *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado T.A 2010-2012*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal.638-645. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/4378/3907>. 10 September 2019.
- Harahap, S. S, 2010. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011 ed. DKI Jakarta, Jakarta.
- Fauziah, 2011. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DI Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)*.SKRIPSI. Padang: Universitas Andalas. Downloads/Documents\FAUZIAH\_0810535235.pdf. 10 September 2019.
- Sari, W. P. 2011. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang*. SKRIPSI. Universitas Andalas. [http://repo.unand.ac.id/406/1/ANALISA\\_PENERAPAN\\_SISTEM\\_AKUNTANSI\\_KEUANGAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/406/1/ANALISA_PENERAPAN_SISTEM_AKUNTANSI_KEUANGAN.pdf). 10September 2019.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

